

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik merupakan salah satu pilar negara demokrasi.¹ Oleh karena itu, tanpa partai politik, mekanisme demokrasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa maju mundurnya perjalanan kehidupan negara demokrasi akan bergantung pada maju mundurnya kehidupan partai politik.² Untuk itulah, dalam negara demokrasi seperti Indonesia membangun, memelihara dan mengembangkan kehidupan partai politik menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Dalam hal ini, kemajuan kehidupan partai politik harus benar-benar diabdikan untuk kepentingan kelompok elite anggota partai politik itu sendiri.

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.³

Gambaran partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sebagai berikut: “Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan

¹ Amin Suprihatini, *Partai Politik Di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2007), hlm.1.

² *Ibid.*

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.404.

dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan menyeleksi calon-calon yang akan mewakili partai politik tersebut.

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.⁵ Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representative government*).⁶ Pemilihan umum juga disebut dengan arena ‘*political market*’ yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.⁷ Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

⁵ Muhadam Labolo & Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.50.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm.51.

pemerintahan, baik sebagai presiden dan wakil presiden, bupati atau walikota dan wakil bupati atau wakil walikota.

Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu adalah suatu proses yang substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan.⁸ Dikatakan suatu penyegaran karena pemilu yang dilakukan secara berkala merupakan suatu sarana untuk meregenerasi kepemimpinan sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter. Melalui pemilu rakyat menilai kinerja pejabat yang telah mereka pilih sebelumnya dan menghukumnya dengan cara tidak memilihnya pada pemilu berikutnya jika kinerja selama menjadi pejabat dinilai buruk. Dengan demikian, para pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan legislatif maupun yang menduduki jabatan eksekutif diseleksi dan diawasi sendiri oleh rakyat.⁹

Pemilu di Indonesia dilakukan dengan sistem multipartai. Sejak pemerintahan demokrasi liberal (orde lama), Indonesia sudah menganut sistem multipartai dengan jumlah partai yang ada sebanyak 29 partai politik pada pemilu pertama tahun 1955.¹⁰ Namun, perkembangan partai politik di Indonesia mengalami jatuh bangun dari masa ke masa. Contohnya pada masa orde baru (masa pemerintahan Soeharto), partai yang mengikuti pemilu adalah dua partai politik dan satu Golongan Karya. Kedua partai politik tersebut yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Namun semasa pemerintahan Soeharto semua periode pemilu dimenangkan oleh Golongan Karya. Hal ini

⁸ *Ibid.* hlm.52.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm.88.

menimbulkan kesan adanya partai tunggal dalam pemerintahan orde baru guna mempertahankan status quo (kekuasaan pemerintah orde baru). Keadaan yang demikian ini, lama kelamaan mendorong warga negara Indonesia untuk mengadakan tuntutan reformasi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang demokratis.

Seiring berjalannya waktu, jumlah partai politik di Indonesia semakin bertambah apalagi setelah runtuhnya pemerintahan presiden Soeharto (era reformasi). Runtuhnya pemerintahan Soeharto mengubah tatanan politik di Indonesia, termasuk di dalamnya sistem kepartaian. Jika pada masa orde baru Indonesia dikuasai oleh pemerintahan yang otoritarian dengan sistem multipartai terbatas, maka pada era reformasi demokrasi langsunglah yang berkuasa. Euforia politik ditandai dengan kemunculan begitu banyak partai politik.¹¹

Kemunculan banyak parpol pada era reformasi ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintahan interregnum B.J. Habibie untuk menerapkan kembali sistem multipartai. Dengan kebijakan ini, euforia politik, demokrasi dan kebebasan juga menghasilkan penghapusan kewajiban parpol untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, seperti ditetapkan pada Undang-Undang keormasan 1985.¹²

Pada era reformasi ini muncul banyak partai baru termasuk partai politik islam seperti partai PKB, PAN, PKS, PBB dan partai islam lainnya. Keberadaan partai islam menjadi salah satu penanda terbukanya keran-keran kebebasan di era

¹¹ *Ibid.* hlm.99.

¹² *Ibid.*

reformasi. Kebangkitan politik aliran islam melandaskan saluran aspirasi politik umat islam tidak lagi hanya bermuara kepada PPP saja. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya partai yang beraliran islam mengikuti pemilu pasca lengsernya kekuasaan politik orde baru sampai pada pemilihan tahun 2019 memperlihatkan kekuatan politik partai islam dalam meraih dukungan pemilih. Sekalipun popularitas dan elektabilitas belum mampu menyaingi partai-partai nasionalis (seperti PDIP, Partai Golkar dan Gerindra), lebih lanjut hal itu dapat dilihat dari perolehan kursi partai-partai islam dari pemilu legislatif 1999-2019.

Tabel 1.1

Perolehan Kursi Partai Politik Islam pada Pemilu Legislatif 1999-2019¹³

Partai	1999	2004	2009	2014	2019
PKB	51	52	28	47	58
PAN	34	53	46	49	44
PPP	58	58	38	39	19
PKS	7	45	57	40	49
PBB	13	11	0	0	0

Sumber: BPS RI

Berdasarkan dari tabel di atas terlihat perolehan suara partai islam yang mengikuti pemilu pada tahun 1999 sampai 2019 masih berada pada posisi partai papan tengah. Kemampuan partai yang berbasis islam belum mampu menggeser posisi partai-partai nasionalis di papan atas. Salah satu faktor yang menyebabkan perolehan kursi partai islam masih sampai pada level partai papan menengah salah satunya adalah akibat kesulitan partai-partai islam dalam mendapatkan suara dan

¹³Diolah dari hasil Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diakses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1995-2019.html> diakses pada 12 Maret 2023.

dukungan dari pemilih non muslim, hal itu dapat dilihat dari pembasisan partai-partai tersebut.¹⁴

Walaupun demikian partai-partai islam tersebut tetap berusaha mendulang suara di tingkat regional maupun nasional. Salah satu cara mendulang suara adalah dengan mengusung kader-kader terbaiknya dalam perhelatan pemilu legislatif baik regional maupun nasional. Selain mengusung kader-kader terbaiknya partai islam menguatkan isu kampanye politik berbasis segmen identitas keagamaan, dimana hal itu banyak dilakukan oleh beberapa elit partai islam saat kampanye pada pemilu. Hal ini dilakukan untuk lebih mengharapkan dukungan dari pemilih islam. Pemilih kelompok non muslim tentunya menjadi tidak nyaman dan merasa secara tidak langsung isu identitas keagamaan yang dibangun partai politik berbasis islam akan sangat merugikan partainya sendiri. Khususnya di wilayah yang penduduknya mayoritas beragama non muslim.

Namun berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Samosir dimana penduduknya mayoritas beragama Kristen. Di kabupaten ini, partai islam berhasil meraih suara dan dukungan dari masyarakat sehingga memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Samosir.

Kabupaten Samosir merupakan hasil pemekaran dari induknya Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh

¹⁴ Maria Fransiska Ignasia, Skripsi: *Eksistensi Partai Islam pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), hlm.2.

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan wilayah administrasi pemerintahan sebanyak 9 kecamatan dan 111 desa serta 6 kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Kemudian pada 27 Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Samosir secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat yang menganut agama Islam merupakan minoritas yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir.

Kabupaten Samosir melakukan pemilu legislatif pertama di tingkat kabupaten pada tahun 2004 setelah dibentuk menjadi suatu kabupaten baru. Kemudian pemilihan legislatif tahun 2009 untuk memperebutkan 25 kursi. Berikut adalah hasil perolehan kursi pada pemilihan legislatif di DPRD tingkat Kabupaten Samosir tahun 2009, 2014 dan 2019.

Tabel 1.3

Hasil Pemilu Legislatif di DPRD Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2009,
2014 dan 2019¹⁵

No	Partai Politik	2009	2014	2019
1	PDIP	2	6	8
2	Nasdem	0	4	5
3	PKB	0	2	4
4	Golkar	2	3	3
5	Gerindra	1	3	2
6	Demokrat	2	3	2
7	Hanura	3	3	1
8	PAN	0	1	0
Jumlah anggota		25	25	25

Sumber: Artikel berita

Pada pemilu 2019 di Kabupaten Samosir, ada sembilan partai yang mendaftarkan calon anggota legislatif (caleg) ke KPUD Kabupaten Samosir.¹⁶ Kesembilan partai itu adalah PKB, Nasdem, Golkar, Hanura, Partai Demokrat, PAN, PSI, Gerindra dan PDI Perjuangan. Namun yang berhasil meraih kursi di DPRD Kabupaten Samosir hanya 7 partai politik.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 2 partai islam yang dapat masuk ke kursi parlemen pada pemilihan umum legislatif Kabupaten Samosir yaitu partai PKB dan PAN. PKB merupakan salah satu partai politik yang lahir di era reformasi yang dideklarasikan oleh para kiai Nadhlatul Ulama (NU). Adapun partai PAN merupakan partai yang digagas oleh beberapa tokoh nasional termasuk Amien Rais sebagai salah satu pilihan wadah aspirasi politik warga Muhammadiyah yang

¹⁵ [https://profilpelajar.com/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir](https://profilpelajar.com/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Samosir), diakses pada 6 Maret 2023.

¹⁶ <https://www.jakartaobserver.com/2018/07/sembilan-partai-daftarkan-caleg-di.html>, diakses pada 12 Maret 2023.

terbuka juga untuk semua kalangan. Walaupun kedua partai tersebut merupakan partai islam namun partai tersebut berhasil menjadi partai pemenang pemilu legislatif di Kabupaten Samosir yang mayoritas penduduknya beragama Kristen.

Partai PKB pada pemilihan legislatif Kabupaten Samosir tahun 2014 berhasil memperoleh 2 kursi dan pada pemilihan tahun 2019 berhasil memperoleh 4 kursi. Sedangkan partai PAN pada pemilihan legislatif 2014 memperoleh 1 kursi, namun pada 2019 tidak berhasil memperoleh kursi. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana partai politik islam di Kabupaten Samosir bisa memperoleh kursi pada pemilihan legislatif dimana masyarakatnya mayoritas beragama Kristen.

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maria Fransiska Ignasia dengan judul “Eksistensi Partai Islam Di Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan partai politik islam di Kabupaten Mamasa pada pemilu tahun 2019 serta untuk mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat di Kabupaten Mamasa terhadap partai islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan partai politik yang berasaskan islam di Kabupaten Mamasa adalah merekrut kandidat dari kalangan non muslim dan mencitrakan diri sebagai partai pluralis. Sementara penerimaan masyarakat terhadap partai politik islam di Kabupaten Mamasa

¹⁷ Maria Fransiska Ignasia, Skripsi: *Eksistensi Partai Islam pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

dikarenakan asas partai tidak mempengaruhi perilaku pemilih dan isu identitas agama tidak mempengaruhi perilaku pemilih.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih memfokuskan penelitiannya terhadap strategi partai politik islam pada pemilu dan penerimaan masyarakat terhadap partai politik islam. Sementara dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya terhadap keterperolehan kursi partai politik islam pada pemilihan legislatif di Kabupaten Samosir. Penelitian oleh Maria Fransiska Ignasia berlokasi di Kabupaten Mamasa, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Samosir.

Penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Ahmad Syukri dengan judul “Analisa Pemasaran Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus: DPW Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta)”.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui teori marketing politik 4P, PKS DIY memiliki kekuatan pada variabel product (produk) dengan indikator personal karakteristik. Hal ini ditunjukkan melalui caleg PKS DIY yang dikenal dekat dengan masyarakat, salah satunya yaitu Amir Syarifudin. Sedangkan kelemahan PKS DIY terdapat pada variabel place (tempat) atau pemetaan wilayah. Hal ini dikarenakan kurangnya data yang digunakan untuk memetakan wilayah dengan menggunakan data-data yang umum seperti data pemilu dan data dari Badan

¹⁸ Ahmad Syukri, Skripsi: *Analisa Pemasaran Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus: DPW Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

Pusat Statistik (BPS). Hasil tersebut menunjukkan bahwa caleg PKS DIY memiliki modal social yang kuat dalam meraih suara masyarakat DIY.

Adapun perbedaan penelitian ini adalah dari segi objek dan lokasi penelitiannya. Objek penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syukri yaitu Partai Keadilan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilihan legislatif tahun 2019. Sementara dalam penelitian ini, objek penelitiannya yaitu partai politik islam (PKB dan PAN) pada pemilihan legislatif di Kabupaten Samosir.

Melihat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Samosir. Hal ini bagi penulis sangat menarik untuk diteliti karena pada pemilihan legislatif di Kabupaten Samosir partai politik islam berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Samosir dimana masyarakatnya mayoritas beragama Kristen. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk membuat suatu penelitian skripsi yang berjudul: **“Analisis Keterperolehan Kursi Partai Politik Islam Pada Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Samosir Pada Era Reformasi (Studi Kasus Tahun 2014 dan 2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi keterperolehan kursi partai politik islam pada pemilihan legislatif di Kabupaten Samosir pada era reformasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi keterperolehan kursi partai politik islam pada pemilihan legislatif di Kabupaten Samosir pada era reformasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembacanya baik secara akademik maupun secara praktis.

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya tentang analisis keterperolehan kursi partai politik islam pada pemilihan legislatif di Kabupaten Samosir.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait, dan bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

1.5 Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Political Marketing. Teori ini dipilih karena teori ini dikira cocok dengan permasalahan yang akan diteliti, dimana masyarakat di tempat lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Samosir mayoritas beragama Kristen tetapi partai politik islam berhasil memperoleh kursi pada pemilihan legislatif (pileg) di Kabupaten Samosir. Ada kecenderungan bahwa masyarakat Kabupaten Samosir memilih tidak hanya sebatas

pada identitas-identitas nasional seperti agama, ras maupun etnis. Hal ini bisa dibuktikan dengan partai PKB yang memperoleh 2 kursi pada pileg 2014 dan 4 kursi pada pileg 2019, serta partai PAN yang memperoleh 1 kursi pada pileg 2014. Dengan demikian, peneliti menempatkan teori ini sebagai unit analisis dalam penelitian terkait keterperolehan kursi partai politik islam dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Samosir.

1. Marketing Politik (Political Marketing)

Menurut Firmanzah, marketing politik bukanlah konsep untuk menjual partai politik atau kandidat individu ke pemilih, namun sebuah konsep yang menawarkan sebuah partai politik atau kandidat individu bisa membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual.¹⁹ Mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang berasal dari masyarakat adalah hal penting yang harus dilakukan sebelum menyusun program kerja. Marketing politik adalah konsep permanen yang harus dilakukan terus menerus oleh kandidat dalam membangun kepercayaan melalui proses jangka panjang bukan hanya pada saat kampanye.²⁰ Lebih lanjut Less Marshmant dalam Firmanzah memberikan pemahaman marketing politik lebih komprehensif.

- a) Marketing politik lebih daripada sekadar komunikasi politik.
- b) Marketing politik diaplikasikan dalam seluruh proses organisasi partai politik.

Tidak hanya tentang kampanye politik tetapi juga sampai pada tahap bagaimana

¹⁹ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realita*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm.197.

²⁰ *Ibid.* hlm.198.

memformulasikan produk politik melalui pembangunan simbol, image, platform, dan program yang ditawarkan.

- c) Marketing politik menggunakan konsep marketing secara luas, tidak hanya terbatas pada teknik marketing, namun juga sampai strategi marketing, dari teknik publikasi, menawarkan ide dan program, dan desain produk sampai ke market intelligent serta pemrosesan informasi.
- d) Marketing politik melibatkan banyak disiplin ilmu dalam pembahasannya, seperti sosiologi dan psikologi. Misalnya produk politik merupakan fungsi dari pemahaman sosiologis mengenai simbol dan identitas, sedangkan faktor psikologisnya adalah kedekatan emosional dan karakter seorang pemimpin sampai ke aspek rasionalitas platform partai.
- e) Marketing politik bisa diterapkan dalam berbagai situasi politik, mulai dari pemilihan umum sampai ke proses lobi di parlemen.²¹

Firmanzah menjelaskan dalam proses marketing politik dapat menggunakan teori 4P bauran marketing yaitu:

a. Produk (Product)

Produk dalam pemasaran politik berarti partai, kandidat, dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan. Produk ini berisi konsep, identitas ideologi, program, serta kebijakan. Selain itu produk juga akan menghasilkan suatu isu politik yang menghasilkan image partai. Produk dapat berupa personal character,

²¹ *Ibid.*

platform partai, past record (catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau) serta janji-janji kampanye.²²

b. Promosi (Promotion)

Promosi merupakan upaya yang dilakukan untuk menarik perhatian para pembeli melalui teknik-teknik komunikasi, apakah itu melalui media massa cetak atau elektronik maupun komunikasi antar pribadi. Suatu anggapan keliru jika pengeluaran biaya untuk promosi dinilai sebagai pemborosan, padahal dalam pasaran biaya untuk promosi harus dinilai sebagai investasi. Dalam konteks komunikasi politik, promosi dapat berupa advertising ataupun kampanye. Promosi ataupun kampanye memegang peranan penting bukan saja dalam memasarkan partai politik beserta program dan visinya, tetapi juga dalam memasarkan kandidat yang akan diajukan sebagai kontestan politik.²³

c. Harga (Price)

Harga adalah elemen yang sangat penting dalam pemasaran, harga menentukan daya saing dalam pasar, namun perlu diingat adalah harga memiliki segmen pasar tertentu. Marketing politik pada harga ini mempertimbangkan tiga bentuk nilai yaitu nilai ekonomi, psikologi dan juga citra nasional. Nilai ekonomi berarti semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis yang dapat berupa rasa nyaman pemilih dengan latar belakang, etnis, agama dan juga pendidikan. Sedangkan citra nasional

²² *Ibid.* hlm.200.

²³ *Ibid.* hlm.203.

yaitu suatu kondisi pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan juga dapat menjadi kebanggaan negara.²⁴

d. Penempatan (Place)

Penempatan merupakan cara hadir/distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berarti sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik secara geografis maupun demografis.²⁵

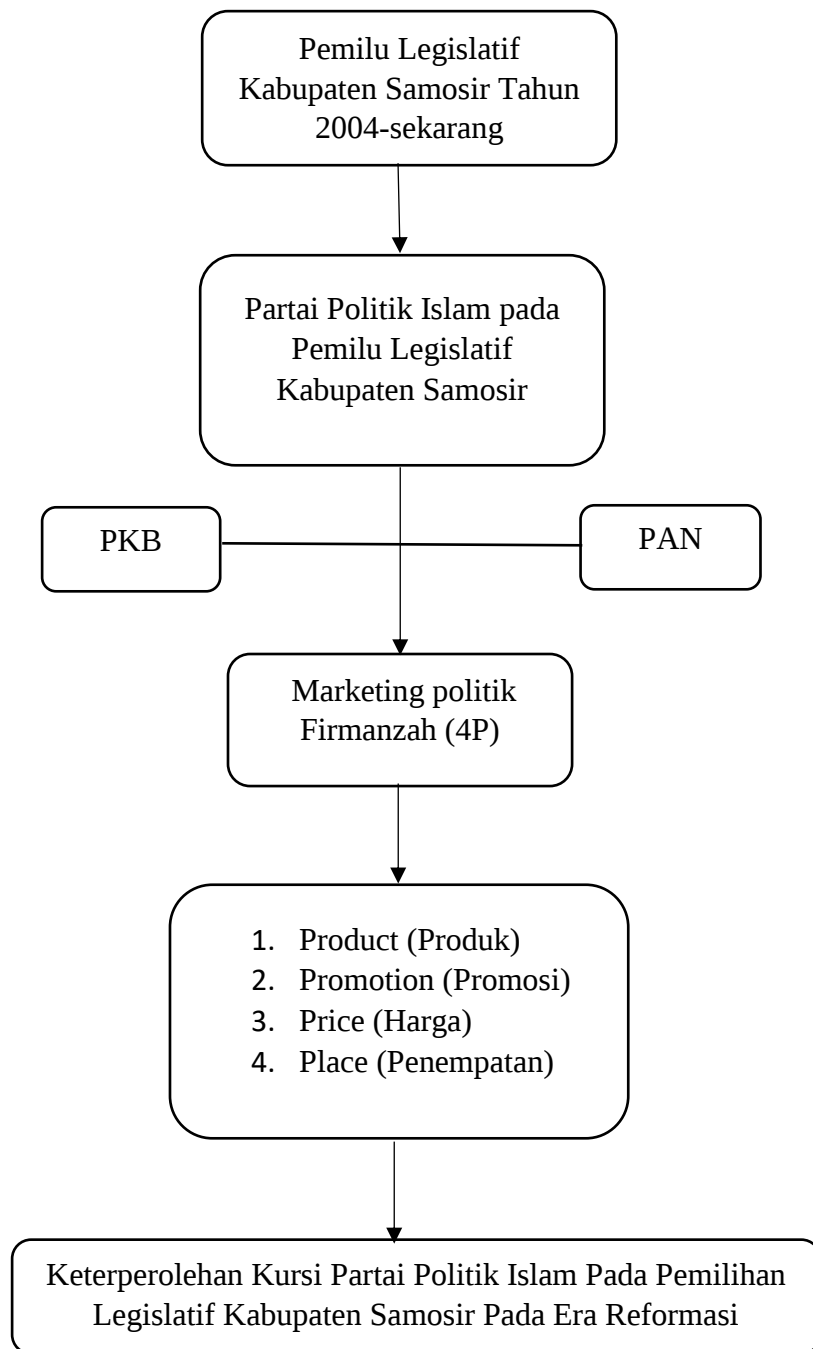
Penempatan dalam pemasaran sangat penting dan strategis dalam menarik perhatian pembeli. Pemilihan dan penentuan tempat harus memiliki nilai ekonomi untuk memajang produk-produk yang ingin dipasarkan. Dalam konteks komunikasi politik, place sering diasosiasikan dengan istilah ruang publik, misalnya media massa yang dapat digunakan untuk memasarkan partai beserta cita-cita dan programnya.

Menggunakan 4P marketing dalam dunia politik menjadikan marketing politik tidak hanya sebatas masalah iklan dan komunikasi politik. Lebih dari itu, marketing politik adalah pendekatan komprehensif dalam hal yang menyangkut cara sebuah institusi politik ketika memformulasikan produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan komunikasi politik, strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik. Kondisi sosial budaya suatu wilayah geografis dan demografis juga harus diperhitungkan dalam segmentasi dan formulasi isu politik.

²⁴ *Ibid.* hlm.205.

²⁵ *Ibid.* hlm.207.

1.6 Kerangka Berpikir



Gambar diatas merupakan skema berpikir penulis dalam penelitian yang berusaha melihat partai politik islam sebagai parpol yang memperoleh kursi dalam konteks pemilihan legislatif Kabupaten Samosir sejak tahun 2004 sampai sekarang.

Pemilihan legislatif Kabupaten Samosir diikuti oleh berbagai partai politik dengan bermacam-macam ideologi, dan corak partai. Namun dalam hal ini terdapat 2 partai politik islam yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Samosir yaitu partai PKB dan PAN. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Marketing Politik Firmanzah yaitu teori 4P yang terdiri atas product, promotion, price dan place. Penelitian ini akan mencari bagaimana partai politik islam bisa memperoleh kursi pada pemilihan legislatif Kabupaten Samosir berdasarkan teori 4P tersebut.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁶ Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

²⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm.79.

Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.

Alasan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif ialah karena dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sangat mendukung dalam penganalisaan terhadap gejala kekuatan di masyarakat khususnya di bidang sosial dan politik. Penelitian ini mencoba memahami tentang apa yang dilakukan partai politik islam atau cara partai dalam usahanya mendapatkan suara sehingga memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Samosir.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor DPC partai PKB dan PAN Kabupaten Samosir yang beralamat di Jl. DR JI. FL Tobing, Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (DPC PKB) dan Jl. DI Panjaitan Desa Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir (DPC PAN). Pertimbangan penulis meneliti di lokasi ini guna memperoleh keterangan-keterangan informasi data yang diperlukan dalam penelitian yang akan diteliti.

1.7.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus peneltian ini yaitu tentang bagaimana strategi keterperolehan kursi partai politik islam dalam pemilihan legislatif Kabupaten Samosir pada era reformasi, sebagaimana partai PKB dan PAN memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Samosir.

1.7.4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (responden) atau data pokok yang didapatkan dilapangan, instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu pedoman wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini data sekunder bersumber dari literature, buku, jurnal dan internet yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan seorang informan dengan objek yang diteliti.

Penentuan informan dipilih secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²⁷

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu akan dijabarkan dalam tabel berikut.

²⁷ *Ibid.* hlm.137.

Tabel 1.4

Sasaran Penentuan Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah	Alasan
1.	Nasip Simbolon	Ketua DPC partai PKB & anggota DPRD terpilih	1	Merupakan informasi utama dari penelitian yang akan dijalankan.
2.	Naris Sitanggang	Ketua DPD partai PAN	1	Merupakan informasi utama dari penelitian yang akan dijalankan.
3.	Haposan Sidauruk, Noni Sulvia S, Pantas Lasidos Limbong	Anggota DPRD terpilih dari partai PKB	3	Peneliti membutuhkan informasi langsung dari calon terpilih untuk mengetahui bagaimana calon dapat terpilih sebagai DPRD Kabupaten Samosir.
4.	Ronal Nirma Sihotang	Anggota DPRD terpilih dari partai PAN	1	Peneliti membutuhkan informasi langsung dari calon terpilih untuk mengetahui bagaimana calon dapat terpilih sebagai DPRD Kabupaten Samosir.
5.	Dirikon Simbolon	Masyarakat setempat (Kepala Desa Pardomuan I)	1	Penulis menysasar tokoh masyarakat di wilayah setempat yang dianggap sebagai penyumbang suara pada pemilihan.

Adapun alasan dipilihnya informan tersebut karena dianggap mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti dan juga dianggap mengetahui kondisi internal partai PKB dan PAN.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.²⁸ Sehingga dibutuhkan adanya teknik pengambilan data yang dapat digunakan secara cepat dan tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti.²⁹ Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka. Pengamatan dilakukan kepada orang-orang yang paham dan mengenal secara mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

b. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data kualitatif adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan dokumen yang menjadi catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian seperti laporan-laporan, foto-foto serta rekaman suara masing-masing informan yang telah ditentukan. Alat pengumpulan data dalam

²⁸ *Ibid.* hlm.142.

²⁹ *Ibid.* hlm.143.

penelitian ini yaitu, pedoman wawancara, catatan lapangan, handphone (sebagai perekam suara, video, dan kamera), pena dan kertas.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah langkah selanjutnya dalam pengelolaan data, dimana data yang didapat, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian ada di lapangan. Kesimpulan

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

1.7.8. Triangulasi atau Keabsahan Data

Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.³⁰ Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.³¹ Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

³⁰ Zuchri Abdussamad, Op. Cit., hlm.190.

³¹ *Ibid.*